



PEMERINTAH  
PROVINSI BALI



සමුහගාමීය සාමාජිකයා  
nanggun ékat kerthi loka bali  
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



*mentju:*

**BALI ERA BARU  
BALI SMART ISLAND**

**ONE ISLAND,  
ONE MANAGEMENT**

Alamat Kantor: Jl. D.I. Panjaitan No. 7, Nitimandala Renon, Denpasar Bali  
Telp. (0361) 225859 | Fax. (0361) 227810



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan D.I Panjaitan No.7 Denpasar (80235) Bali, Telp.(0361) 225859 – Fax. (0361) 227810

Website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI**

**NOMOR 20 / TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan Renja Perangkat Daerah, perlu mempersiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor:61);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
  - mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
  - menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 kepada Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
  - melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Sekretaris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

pada tanggal 22 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI,



GEDE PRAMANA  
NIP. 19680531 199703 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI

TANGGAL 22 JANUARI 2021, NOMOR 20 /TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  
Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan  
Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
4. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali.  
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali.  
6. I Wayan Resedana, SE Staf Sub Bag Penyusunan  
Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi  
Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
7. Ni Made Sutarmi Staf Sub Bag Penyusunan Program,  
Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PROVINSI BALI,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002



## KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan Angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 Perubahan telah selesai disusun.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Periode 2018 – 2023 yang dipadukan dengan kebijakan Kepala Daerah untuk Tahun 2022 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD Perubahan Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan segala potensi dan sumber daya yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat diarahkan secara optimal dan bertahap demi Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien dalam rangka mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Demikian agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022.



Kepala Dinas,

**GEDE PRAMANA**

NIP. 19680531 199703 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar . . . . .	i
Daftar Isi . . . . .	ii
BAB I PENDAHULUAN . . . . .	1
1.1 LATAR BELAKANG . . . . .	1
1.2 LANDASAN HUKUM . . . . .	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN . . . . .	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN. . . . .	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2022 . . . . .	5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFOS . . . . .	5
2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH . . . . .	12
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH . . . . .	24
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD . . . . .	25
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH . . . . .	37
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	37
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH . . . . .	38
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN . . . . .	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . . . . .	43
BAB V PENUTUP . . . . .	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- f) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- g) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- l) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;

- m) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2022 Perubahan dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan mewujudkan misi ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah). Sedangkan tujuannya adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya selama 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022) sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Bali dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2018-2023.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2022 Perubahan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Diskominfo Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II : Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Diskominfo, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah: Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V Penutup



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOS.

Sesuai Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ditetapkan perencanaan kinerja untuk tahun 2022 sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 35 Sub kegiatan.

Dalam tabel berikut disajikan program, kegiatan dan indikator kinerja dalam target dan realisasi kinerja sbb :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2022				
				Target Renja Diskomifos Th 2022		Realisasi Renja Diskomifos Th 2022	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5		6	7	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,50	79,00		80,43		101,81%
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	58 dokumen	16	dokumen	10	dokumen	63%
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	15 dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 dokumen	12	dokumen	6	dokumen	50%
2.16.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	375 dokumen	75	dokumen	39	dokumen	52%
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 dokumen	64	dokumen	30	dokumen	47%
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dokumen	11	dokumen	9	dokumen	82%
2.16.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	5 paket	1	paket	1	paket	100%
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%

2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	5 paket	1	paket	1	paket	100%
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	15576 kotak	0	kotak	0	kotak	0%
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan	333 laporan	10	laporan	6	laporan	60%
2.16.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan</b>	15 paket	1	paket	1	paket	100%
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	10 paket	0	paket	0	paket	0%
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	5 paket	1	paket	1	paket	100%
2.16.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	60 bulan	12	bulan	12	bulan	100%
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Kebersihan bangunan gedung kantor	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai</b>	2695 unit	539	unit	72	unit	13%
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	140 unit	30	unit	30	unit	100%
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2445 unit	489	unit	196	unit	40%

2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	60 bulan	12	bulan	6	bulan	50%
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	10 paket	7	paket	7	paket	100%
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	60 bulan	51	bulan	30	bulan	59%
<b>2.16.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>93,20</b>	<b>79,00</b>		<b>93,62</b>		<b>118,51%</b>
2.16.02.1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81		79		
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	600 buah	120	buah	55	buah	46%
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	150000 berita/tayang	30000	berita/tayang	18000	berita/tayang	60%
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bintek PPID, majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan kesenian rakyat dan layanan informasi	531 kali	117	kali	70	kali	60%
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	265 kali	77	kali	70	kali	91%
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	34 kali	16	kali	7	kali	44%
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	70000 photo/video	14000	photo/video	7128	photo/video	51%
<b>2.16.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>3,00</b>	<b>2,520</b>		<b>3,680</b>		<b>146,03%</b>
<b>2.16.03.1.02.</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik</b>	25 aplikasi	25	aplikasi	9	aplikasi	36%
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	10 paket	2	paket	1	paket	50%
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	195 OPD/UPT	39	OPD/UPT	39	OPD/UPT	100%



2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	100 aplikasi	25 aplikasi	9 aplikasi	36%
<b>2.20.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data statistik sektoral yang valid</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>2.20.02.1.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi</b>	<b>55 sektor</b>	<b>11 sektor</b>	<b>0 sektor</b>	<b>0%</b>
2.20.02.1.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	5 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%
2.20.02.1.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%
2.20.02.1.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	55 Sektor	11 sektor	0 sektor	0%
<b>2.21.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
<b>2.21.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
<b>2.21.02.1.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan</b>	<b>190 OPD</b>	<b>38 OPD/UPT</b>	<b>38 OPD/UPT</b>	<b>100%</b>
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	5 laporan	2 laporan	0 laporan	0%
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik	5 laporan	38 OPD/UPT	38 OPD/UPT	100%
<b>2.21.02.1.02.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun</b>	<b>190 OPD</b>	<b>38 OPD/UPT</b>	<b>38 OPD/UPT</b>	<b>100%</b>
2.21.02.1.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali	5 laporan	38 OPD/UPT	38 OPD/UPT	100%

Mengacu pada anggaran induk tahun 2022 sesuai DPA tertanggal 3 Januari 2022 nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2022 maka jumlah keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 152.283.895.782,00.

Dalam proses pelaksanaan anggaran pada Triwulan II terdapat perubahan kebijakan berupa penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 616.909.744,00 (semula Rp. 12.875.964.884,00 menjadi Rp. 13.492.874.628,00) karena adanya peralihan jabatan struktural ke fungsional;
- b. Belanja Hibah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bertambah sebesar Rp. 185.000.000,00 (semula Rp. 1.270.000.000,00 menjadi Rp. 1.455.000.000,00);
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertambah sebesar Rp. 26.592.000,00 (semula Rp. 80.361.000,00 menjadi Rp. 106.953.000,00) karena tambahan perjalanan dinas terkait monitoring hibah;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik bertambah sebesar Rp. 948.160.000,00 (semula Rp. 1.775.787.578,00 menjadi Rp. 2.723.947.578,00) karena tambahan dukungan pelaksanaan tugas komunikasi publik pimpinan.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik bertambah sebesar Rp. 15.049.567.500,00 (semula Rp. 9.904.915.644,00 menjadi Rp. 24.954.483.144,00) karena tambahan dukungan pelaksanaan tugas komunikasi publik pimpinan.
- f. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik bertambah sebesar Rp. 7.600.000,00 (semula Rp. 282.027.318,00 menjadi Rp. 289.627.318,00) karena tambahan perjalanan dinas dalam daerah untuk mendukung penerbitan Majalah Bungasandat;
- g. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik bertambah sebesar Rp. 13.680.000,00 (semula Rp. 2.437.653.968,00 menjadi Rp. 2.451.333.968,00) karena tambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan penghimpunan bahan pembahasan dalam forum kehumasan.
- h. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah bertambah sebesar Rp. 126.134.155,00 (semula Rp. 813.654.432,00 menjadi Rp. 939.788.587,00) karena tambahan kegiatan fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali;
- i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas bertambah sebesar Rp. 979.768.000,00 (semula Rp. 632.091.370,00 menjadi Rp. 1.611.859.370,00) karena tambahan dukungan pelaksanaan tugas komunikasi publik pimpinan.

- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah bertambah sebesar Rp. 15.018.993.600,00 (semula Rp. 103.027.334.139,00 menjadi Rp. 118.046.327.739,00) karena tambahan pekerjaan pengadaan lahan kawasan pendukung Taman Teknologi Komunikasi dan tambahan perjalanan dinas dalam rangka pembangunan Taman Teknologi Komunikasi.
- k. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah bertambah sebesar Rp. 38.000.000,00 (semula Rp. 9.235.294.739,00 menjadi Rp. 9.273.294.739,00) karena tambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi *Free Wifi Bali Smart Island*
- l. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik bertambah sebesar Rp. 14.250.000,00 (semula Rp. 4.475.173.858,00 menjadi Rp. 4.489.423.858,00) karena tambahan perjalanan dinas dalam daerah terkait sosialisasi pemanfaatan dan update fitur sejumlah aplikasi.
- m. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi bertambah sebesar Rp. 30.719.800,00 (semula Rp. 116.551.978,00 menjadi Rp. 147.271.778,00) karena tambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk keamanan informasi.

Dengan demikian pagu anggaran semula Rp. 152.283.895.782,00 bertambah menjadi Rp. 185.339.270.581,00 (bertambah Rp. 33.055.374.799,00). Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 sebagaimana target pencapaian renstra 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 44,19%.

Realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 28.437.064.850,00 atau sebesar 18,67% dari total anggaran induk sebesar Rp. 152.283.895.782,00. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfos Tahun 2022 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Diskominfos Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, maka uraian program berdasarkan target dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 18.871.637.282,00 terealisasi sebesar Rp. 9.359.220.683 (49,59%).
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu Rp. 15.846.130.310,00 terealisasi Rp. 9.393.123.022 (59,28%).
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan pagu Rp. 116.737.802.736,00 terealisasi Rp. 9.348.320.835 (8,01%).
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pagu Rp. 486.822.218,00 terealisasi Rp. 184.182.720 (37,83%).

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan pagu Rp. 341.503.236,00 terealisasi Rp. 152.217.590 (44,57%).

## 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi. Diwujudkan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
  - a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  
Memfasilitasi kegiatan pimpinan pada setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan menyebarkan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang.
  - b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
Bekerjasama dengan awak media baik media cetak, elektronik dan media online dalam rangka publikasi kegiatan pimpinan di media cetak, elektronik dan online.
  - c. Pelayanan Informasi Publik  
Layanan Informasi Publik dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat melalui :
    - Menyiapkan posko pelayanan dan pengaduan informasi kepada masyarakat dengan tenaga pelayan standby setiap hari kerja, disiapkan juga pelayanan melalui media online melalui akun: twitter @DiskominfosBali, Facebook @DiskominfosBali, ppid@baliprov.go.id (untuk permohonan informasi), SP4N-LAPOR (untuk pengaduan). Untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, telah dilaksanakan Bimtek PPID sebanyak 2 kali (target 4 kali)
    - Penerbitan majalah kerajinan rakyat sebanyak 1 edisi
    - Pelaksanaan pameran pembangunan secara virtual.
    - Pertunjukan rakyat berupa topeng bondres dilaksanakan untuk menyebarkan informasi-informasi terkait program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali sehingga mudah



diterima masyarakat. Pertunjukan kesenian rakyat sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan sebanyak 2 kali penyelenggaraan

d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Pelaksanaan dialog kehumasan dalam rangka membangun kemitraan dengan media cetak elektronik dan online serta pejabat pengelola kehumasan Kab/Kota, instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Dialog kehumasan dilaksanakan secara virtual.
- Pelayanan sarana komunikasi dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang membutuhkan sarana sound sistem. Pelayanan sarana komunikasi tersebut berupa penyediaan satu unit mobil sound lengkap dengan fasilitas sound dan operatornya yang selalu siap setiap saat melayani bila dibutuhkan. Tahun 2022 ini seluruh kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang membutuhkan alat komunikasi telah dapat dilayani dengan baik.
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPID Bali.

e. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

- Kegiatan Literasi Media yang dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di media sosial dengan baik dan benar serta menangkal berita Hoax. Kegiatan ini selama Triwulan II tahun 2022 telah berlangsung sebanyak 5 kali.
- Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali dengan sub kegiatan memfasilitasi Komisioner Komisi Informasi (KI) melaksanakan kegiatan sesuai amanat peraturan yang berlaku. UUD 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terbentuknya Komisi Informasi di Provinsi Bali merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut. Komisi Informasi melaksanakan tugas menerima,

memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di Provinsi Bali melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.

f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Beberapa kegiatan yang dilakukan yakni Merilis photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali serta memfasilitasi dan mengkoordinir wartawan dalam melakukan peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi Bali.

2. Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diwujudkan dengan kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi melalui sub kegiatan :

a. Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah.

- Pemeliharaan peralatan IT pada pusat data (server dan jaringannya)
- Pembangunan Taman Teknologi “Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali” yang berlokasi di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng. Tower ini dibangun untuk mengatasi *Blank Spot*, terutama wilayah Bali bagian Utara, yaitu di Kabupaten Buleleng, Jembarana dan Karangasem. Disamping itu terdapat pula bangunan pedestal menara yang berfungsi sebagai wahana wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan kebudayaan Bali dalam berkomunikasi. Sehingga apabila pembangunan tower ini sudah selesai dan berfungsi akan menjadi destinasi wisata terpadu yang merupakan ruang luar ramah lingkungan yang mencerminkan hubungan Alam, Krama dan Kebudayaan Bali terdiri dari 6 Zona; Zona Edukasi, Zona Komunal, Zona Komersial (UMKM), Zona Rekreatif, Zona Pengelola, dan Zona Perkebunan.

b. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintahan daerah.

Penyediaan bandwidth Layanan Free Wifi di Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas sejumlah 1.520 titik dilaksanakan dalam bentuk BKK ke Kabupaten/Kota untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi. Pemeliharaan Jaringan Induk (Jalur FO),

Pemeliharaan Data Center, Pengadaan Bandwith Data Centre dan Bandwith untuk Free WiFi di SMAN/SMKN/SLBN sebanyak 153 titik untuk mendukung pengembangan sistem tata kelola yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

- c. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik.

Pembentukan Dewan TIK Daerah dan Tim Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Bali Smart Island, Pelayanan aplikasi untuk OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Bali. Berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri antara lain:

- Aplikasi Manajemen User melalui *Single Sign On* (SSO);
- Aplikasi Absensi digital (*Face Detection*);
- Aplikasi Kantor Virtual;
- Aplikasi Sistem Informasi Pangan Utama Strategis (SIGAPURA);
- Tanda Tangan Elektronik (TTE);
- Aplikasi *Bali Media Centre* (BMC);
- Aplikasi SIKUAT;
- Aplikasi SISNAKER;
- Aplikasi UMKM, IKM;
- Aplikasi Koperasi;
- Aplikasi Bali Satu Data;
- Aplikasi Love Bali;
- Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT);
- Integrasi SIMPEG dengan aplikasi lainnya;
- Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS);
- Aplikasi Marketplace : Made In Bali;
- Aplikasi E-Perizinan; dan
- *Website* dan *email* resmi Baliprov

3. Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik yang berkualitas dengan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi melalui sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.  
Pengumpulan Data Statistik sektoral dilaksanakan dalam rangka tersedianya data statistik sektoral. Penyusunan Data dan Informasi Hasil Pembangunan dengan menerbitkan Buku Bali Membangun sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
  - b. Membangun metadata statistik sektoral
  - c. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.
4. Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dengan kegiatan :
- a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi melalui sub kegiatan :
    - Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi. Pekerjaan yang telah berjalan antara lain:
      - ✓ kegiatan pelayanan kontra penginderaan kepada pimpinan daerah dalam rangka mencegah celah kebocoran informasi;
      - ✓ kegiatan pelayanan IT *Security Assessment* (ITSA) untuk aplikasi vital/sensitif di Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
      - ✓ kegiatan pengamanan VVIP (RI 1 dan RI 2) melalui pengacakan sinyal (*jammer*)
    - Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik diharapkan terwujudnya kerahasiaan informasi antar pemerintah. Pekerjaan yang telah berjalan antara lain:
      - ✓ Jaring Komunikasi Sandi pada Perangkat Daerah dengan menggunakan email sanapati dalam pengiriman berita biasa/rahasia;
      - ✓ Kegiatan layanan sertifikat elektronik kepada seluruh pejabat Eselon II, Kepala UPTD dan Kepala Sekolah;

- ✓ Kegiatan pelayanan aduan siber melalui BALIPROV-CSIRT yang merupakan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali yang bertugas untuk melindungi data dan sistem dari insiden keamanan siber yang terjadi.
- b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi melalui sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab / Kota se Bali, dilakukan karena Provinsi merupakan Pembina persandian Kabupaten/Kota. Monitoring ke kabupaten/kota dilakukan terhadap hubungan jaring komunikasi sandi, sumberdaya yang ada dan kesiapan sarana prasarana. Pekerjaan-pekerjaan lain yang telah berjalan antara lain:

- Kegiatan Literasi Siber yang dimaksudkan untuk memberikan edukasi terkait keamanan di dunia siber kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh OPD, UPTD, dan Sekolah-sekolah serta memberikan materi pada kegiatan Latsar CPNS.

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI S/D TRIWULAN II BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Th (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	12.763.590,00	8.986.500,00	82,55	91,61	82,55	70,41	3.777.090,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	4.738.970,00	3.872.500,00	100,00	100,00	100,00	81,72	866.470,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	5.588.340,00	4.093.500,00	85,76	84,88	85,76	73,25	1.494.840,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	12.875.964.884,00	6.620.177.375,00	50,04	54,19	50,04	51,42	6.255.787.509,00
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	1.270.000.000,00	780.000.000,00	66,14	82,35	66,14	61,42	490.000.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	4.615.500,00	2.040.500,00	100,00	51,50	100,00	44,21	2.575.000,00



No	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Th (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	354.987.750,00	80.843.000,00	100,00	76,68	100,00	22,77	274.144.750,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	80.000.000,00	23.896.000,00	29,89	29,97	29,89	29,87	56.104.000,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	8.930.400,00	5.884.800,00	100,00	100,00	100,00	65,90	3.045.600,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	35.805.000,00	14.905.000,00	49,99	44,33	49,99	41,63	20.900.000,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	80.361.000,00	43.543.700,00	77,53	60,42	77,53	54,19	36.817.300,00
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	17.154.000,00	16.910.000,00	100,00	100,00	100,00	98,58	244.000,00
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	3.020.000,00	3.020.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	262.605.000,00	115.710.192,00	49,24	50,00	49,24	44,06	146.894.808,00

No	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Th (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	135.510.000,00	34.073.884,00	50,19	49,87	50,19	25,14	101.436.116,00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	1.866.980.272,00	902.078.292,00	47,68	76,57	47,68	48,32	964.901.980,00
17	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	4.800.000,00	1.787.000,00	76,66	51,68	76,66	37,23	3.013.000,00
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	149.740.000,00	19.919.700,00	54,60	41,36	54,60	13,30	129.820.300,00
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai Lainnya	1.537.138.576,00	617.608.562,00	43,89	52,15	43,89	40,18	919.530.014,00
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	160.934.000,00	59.870.178,00	55,61	42,45	55,61	37,20	101.063.822,00
21	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	1.775.787.578,00	649.032.080,00	55,09	41,28	55,09	36,55	1.126.755.498,00

No	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Th (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	9.904.915.644,00	5.837.066.282,00	49,40	60,73	49,40	58,93	4.067.849.362,00
23	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	282.027.318,00	124.762.660,00	53,60	44,43	53,60	44,24	157.264.658,00
24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kerjasama jejaring komunikasi serta informasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	2.437.653.968,00	2.187.015.220,00	90,09	97,58	90,09	89,72	250.638.748,00
25	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	813.654.432,00	344.963.180,00	42,96	42,51	42,96	42,40	468.691.252,00
26	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	632.091.370,00	250.283.600,00	64,71	64,43	64,71	39,60	381.807.770,00
27	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	103.027.334.139,00	5.386.916.264,00	6,88	37,34	6,88	5,23	97.640.417.875,00
28	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	9.235.294.739,00	2.355.517.678,00	51,83	51,00	51,83	25,51	6.879.777.061,00

No	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Th (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	4.475.173.858,00	1.605.886.893,00	62,80	60,83	62,80	35,88	2.869.286.965,00
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	220.504.016,00	41.378.240,00	23,35	22,63	23,35	18,77	179.125.776,00
31	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun	140.047.996,00	63.694.540,00	63,04	54,36	63,04	45,48	76.353.456,00
32	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	126.270.206,00	79.109.940,00	66,06	66,06	66,06	62,65	47.160.266,00
33	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan	116.551.978,00	53.871.020,00	51,77	51,08	51,77	46,22	62.680.958,00
34	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah provinsi Bali	95.540.900,00	39.793.350,00	55,50	53,13	55,50	41,65	55.747.550,00

No	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Th (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali	129.410.358,00	58.553.220,00	52,46	52,42	52,46	45,25	70.857.138,00
	Jumlah		<b>152.283.895.782,00</b>	<b>28.437.064.850,00</b>	<b>21,55</b>	<b>44,19</b>	<b>21,55</b>	<b>18,67</b>	<b>123.846.830.932,00</b>

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, mempunyai 22 misi dan sesuai tugas pokok dan fungsi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkan misi Kepala Daerah ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah). Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

berperan dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik. Sedangkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan maka harus didukung dengan data yang valid. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga melaksanakan program pengembangan data statistik daerah, guna penyediaan data sektoral yang digunakan sebagai dasar pembangunan.

Selain mewujudkan misi ke 22, dalam rangka mewujudkan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Pengembangan Infrastruktur TIK, serta Optimalisasi Keamanan Informasi Publik. Tugas pokok dan fungsi diwujudkan dalam bentuk program dan direalisasi melalui kegiatan dengan sub-sub kegiatannya.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022

Dalam rancangan akhir perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, diberlakukan kebijakan penguatan anggaran melalui *refocusing* dan rasionalisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas. Hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan capaian target kinerja dan pendanaan pada beberapa program dan kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada RKPD Induk Tahun 2022, termasuk juga pada program dan kegiatan pada urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Beberapa program dilakukan penyesuaian termasuk adanya penambahan anggaran yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Rekapitulasi daftar perubahan anggaran program dan kegiatan pada rancangan akhir perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2 16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>151.455.570.328,0 0</b>	<b>184.480.225.327,00</b>	<b>33.024.654.999,00</b>	
<b>2 16 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>18.871.637.282,00</b>	<b>19.700.139.026,00</b>	<b>828.501.744,00</b>	
<b>2 16 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan	<b>16 Dokumen</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>23.090.900,00</b>	<b>23.090.900,00</b>	-	
2 16 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	3 dokumen	3 dokumen	12.763.590,00	12.763.590,00	-	
2 16 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	4.738.970,00	4.738.970,00	-	
2 16 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	12 dokumen	12 dokumen	5.588.340,00	5.588.340,00	-	
<b>2 16 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan administrasi keuangan	<b>75 Dokumen</b>	<b>75 Dokumen</b>	<b>14.145.964.884,00</b>	<b>14.947.874.628,00</b>	<b>801.909.744,00</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	64 dokumen	64 dokumen	12.875.964.884,00	13.492.874.628,00	616.909.744,00	Penambahan anggaran karena peralihan jabatan struktural ke fungsional
2 16 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	11 dokumen	11 dokumen	1.270.000.000,00	1.455.000.000,00	185.000.000,00	Penambahan anggaran belanja hibah
<b>2 16 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>564.699.650,00</b>	<b>591.291.650,00</b>	<b>26.592.000,00</b>	
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1 paket	1 paket	4.615.500,00	4.615.500,00	-	
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan	12 bulan	354.987.750,00	354.987.750,00	-	
2 16 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari- hari dan piodalan	12 bulan	12 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	1 paket	8.930.400,00	8.930.400,00	-	
2 16 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar	12 bulan	12 bulan	35.805.000,00	35.805.000,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 16 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1150 kotak	1150 kotak	0,00	0	-	
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 laporan	10 laporan	80.361.000,00	106.953.000,00	26.592.000,00	Tambahan perjalanan dinas terkait monitoring hibah
<b>2 16 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan barang milik Daerah	<b>3 paket</b>	<b>3 paket</b>	<b>17.154.000,00</b>	<b>17.154.000,00</b>	-	
2 16 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2 paket	2 paket	0,00	0	-	
2 16 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	1 paket	1 paket	17.154.000,00	17.154.000,00	-	
<b>2 16 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>401.135.000,00</b>	<b>401.135.000,00</b>	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 16 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	12 bulan	12 bulan	3.020.000,00	3.020.000,00	-	
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	262.605.000,00	262.605.000,00	-	
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	135.510.000,00	135.510.000,00	-	
<b>2 16 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	<b>539 unit</b>	<b>539 unit</b>	<b>3.719.592.848,00</b>	<b>3.719.592.848,00</b>	-	
2 16 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	30 unit	30 unit	1.866.980.272,00	1.866.980.272,00	-	
2 16 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	489 unit	489 unit	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	149.740.000,00	149.740.000,00	-	
2 16 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	7 unit	7 unit	1.537.138.576,00	1.537.138.576,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 16 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	51 unit	51 unit	160.934.000,00	160.934.000,00	-	
<b>2 16 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<b>81 indeks</b>	<b>81 indeks</b>	<b>15.846.130.310,00</b>	<b>32.971.039.965,00</b>	<b>17.124.909.655,00</b>	
<b>2 16 02 1.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	<b>79 indeks</b>	<b>79 indeks</b>	<b>15.846.130.310,00</b>	<b>32.971.039.965,00</b>	<b>17.124.909.655,00</b>	
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	120 buah	120 buah	1.775.787.578,00	2.723.947.578,00	948.160.000,00	Tambahan dukungan pelaksanaan tugas komunikasi publik pimpinan
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	9.904.915.644,00	24.954.483.144,00	15.049.567.500,00	Tambahan dukungan pelaksanaan tugas komunikasi publik pimpinan
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi	117 kali	117 kali	282.027.318,00	289.627.318,00	7.600.000,00	tambahan perjalanan dinas dalam daerah untuk mendukung penerbitan Majalah Bungasandat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	77 kali	77 kali	2.437.653.968,00	2.451.333.968,00	13.680.000,00	tambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan penghimpunan bahan pembahasan dalam forum kehumasan
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	16 kali	16 kali	813.654.432,00	939.788.587,00	126.134.155,00	Tambahan dukungan kegiatan fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	14000 photo/video	14000 photo/video	632.091.370,00	1.611.859.370,00	979.768.000,00	Tambahan dukungan pelaksanaan tugas komunikasi publik pimpinan
<b>2 16 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<b>2,52 indeks</b>	<b>2,52 indeks</b>	<b>116.737.802.736,00</b>	<b>131.809.046.336,00</b>	<b>15.071.243.600,00</b>	
<b>2 16 03 1.02</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Persentase peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	<b>25 aplikasi</b>	<b>25 aplikasi</b>	<b>116.737.802.736,00</b>	<b>131.809.046.336,00</b>	<b>15.071.243.600,00</b>	
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	2 paket	2 paket	103.027.334.139,00	118.046.327.739,00	15.018.993.600,00	Tambahan pekerjaan pengadaan lahan kawasan pendukung Taman Teknologi Komunikasi dan tambahan perjalanan dinas dalam rangka pembangunan Taman Teknologi Komunikasi



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	39 OPD/UPT	39 OPD/UPT	9.235.294.739,00	9.273.294.739,00	38.000.000,00	Tambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi <i>Free Wifi Bali Smart Island</i>
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	25 aplikasi	25 aplikasi	4.475.173.858,00	4.489.423.858,00	14.250.000,00	tambahan perjalanan dinas dalam daerah terkait sosialisasi pemanfaatan dan update fitur sejumlah aplikasi
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>486.822.218,00</b>	<b>486.822.218,00</b>	-	
<b>2 20 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase data statistik sektoral yang valid	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>486.822.218,00</b>	<b>486.822.218,00</b>	-	
<b>2 20 02 1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	Persentase data statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang valid	<b>11 sektor</b>	<b>11 sektor</b>	<b>486.822.218,00</b>	<b>486.822.218,00</b>	-	
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	220.504.016,00	220.504.016,00	-	
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun	1 dokumen	1 dokumen	140.047.996,00	140.047.996,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	11 sektor	11 sektor	126.270.206,00	126.270.206,00	-	
<b>2 21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>341.503.236,00</b>	<b>372.223.036,00</b>	<b>30.719.800,00</b>	
<b>2 21 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	<b>80 persen</b>	<b>80 persen</b>	<b>341.503.236,00</b>	<b>372.223.036,00</b>	<b>30.719.800,00</b>	
<b>2 21 02 1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<b>38 OPD</b>	<b>38 OPD</b>	<b>212.092.878,00</b>	<b>242.812.678,00</b>	<b>30.719.800,00</b>	
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	116.551.978,00	147.271.778,00	30.719.800,00	Tambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk keamanan informasi
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah provinsi Bali	38 OPD	38 OPD	95.540.900,00	95.540.900,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 21 02 1.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Provinsi	<b>38 OPD</b>	<b>38 OPD</b>	<b>129.410.358,00</b>	<b>129.410.358,00</b>	-	
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali	38 OPD	38 OPD	129.410.358,00	129.410.358,00	-	
<b>TOTAL</b>					<b>152.283.895.782,00</b>	<b>185.339.270.581,00</b>	<b>33.055.374.799,00</b>	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Rancangan awal Renja Diskominfo Tahun 2023 telah disampaikan dan dibahas pada Forum Perangkat Daerah tanggal 21 Pebruari 2022 yang dilaksanakan secara *hybrid* yang diikuti oleh tokoh masyarakat, kalangan akademisi, perangkat daerah terkait provinsi maupun kabupaten/kota, kelompok ahli pembangunan bidang teknologi informasi serta seluruh pejabat dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Usulan/masukan dari peserta forum yang sebagian besar mengarah kepada substansi rancangan dan teknis pelaksanaan selanjutnya ditelaah dan akan disesuaikan dalam rencana teknis pelaksanaan program/kegiatannya sehingga rancangan awal renja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Prioritas Nasional 2 adalah Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Salah satu arah kebijakan prioritas nasional 2, adalah Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi melalui program penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Salah satu arah kebijakan prioritas nasional 2, adalah Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi melalui program penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Program prioritas nasional peningkatan konektivitas TIK dilakukan melalui 5 kegiatan prioritas diantaranya penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK.

Program pengembangan infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan melalui 3 kegiatan prioritas yaitu; kegiatan pengelolaan perangkat dan jaringan system informasi, pemanfaatan infrastruktur jaringan komunikasi dan standarisasi perangkat keamanan data dan informasi.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan misi Kepala Daerah ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah) menetapkan dua tujuan yang tertuang dalam RPJMD:

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator tujuan: survey eksternal pelayanan publik.

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik.

Indikator Sasaran: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pada tujuan 1 tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkannya melalui program:

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disesuaikan dalam program pengelolaan aplikasi informatika.

Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik yang disesuaikan dengan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator Tujuan: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator sasaran: Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Pada tujuan 2 tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkannya melalui program: Pengembangan Data Statistik Daerah yang disesuaikan menjadi program penyelenggaraan statistik sektoral, dengan indikator: Persentase data statistik sektoral yang valid.

Terhadap kedua tujuan tersebut didukung oleh tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 merencanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.



- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- c) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- d) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
- e) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

#### C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
  - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
  - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
  - c) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Provinsi.
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
  - b) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

#### E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.
  - a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 Perubahan meliputi:

Dibidang urusan komunikasi dan informatika direncanakan; Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan literasi media, Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan kapasitas kehumasan, Mengelola perangkat dan jaringan system informasi, menyediakan akses internet kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, SMA/SMK, dan UPT, Menyebarluaskan, mengelola informasi publik. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Dibidang urusan statistik direncanakan; melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data statistik sektoral.

Dibidang persandian direncanakan meningkatkan kapasitas aparatur persandian, hubungan jaringan persandian pusat, provinsi dan kab/kota se Bali dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Seluruh rencana kerja tersebut dirangkum dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Anggaran Perubahan tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 184.480.225.327,00 terinci sbb:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Rp. 19.700.139.026,00;
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  
Rp. 32.971.039.965,00;
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp. 131.809.046.336,00;
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 486.822.218,00;
- E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  
Rp. 372.223.036,00.

Data Pagu Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 sbb:

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Kelua ran Sub Kegiat an	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				184.480.225.327,00			57.493.412.900,00		
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				19.700.139.026,00			22.965.527.900,00		
2	16	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				23.090.900,00			349.386.000,00		
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 dokumen	12.763.590,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3 dokumen	140.670.000,00
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 dokumen	4.738.970,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1 dokumen	38.781.000,00

2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 dokumen	5.588.340,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 dokumen	169.935.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>14.947.874.628,00</b>			<b>14.709.195.000,00</b>		
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	Persentase layanan administrasi keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	64 dokumen	13.492.874.628,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		64 dokumen	13.828.500.000,00
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	Persentase layanan administrasi keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 dokumen	1.455.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 dokumen	880.695.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>591.291.650,00</b>			<b>1.071.000.000,00</b>		
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	4.615.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	5.250.000,00
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur	12 bulan	354.987.750,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 bulan	593.250.000,00

2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	80.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 bulan	134.400.000,00
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	8.930.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	36.750.000,00
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	35.805.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	39.900.000,00
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1150 kotak	0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		0	18.375.000,00
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 laporan	106.953.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		10 laporan	243.075.000,00

2	16	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>17.154.000,00</b>				<b>406.219.000,00</b>	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	Persentase pengadaan barang milik Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		0	309.750.000,00
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	Persentase pengadaan barang milik Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	17.154.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1 paket	96.469.000,00
2	16	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>401.135.000,00</b>				<b>442.221.000,00</b>	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	3.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.360.000,00
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	262.605.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	289.800.000,00
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	135.510.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 bulan	149.061.000,00

2	16	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>3.719.592.848,00</b>				<b>5.987.506.900,00</b>	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	30 unit	1.866.980.272,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		30 unit	2.968.809.900,00
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	489 unit	4.800.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		489 unit	7.192.000,00
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	149.740.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 bulan	173.670.000,00
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 unit	1.537.138.576,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		7 unit	2.459.835.000,00



2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	51 unit	160.934.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		51 unit	378.000.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>						<b>32.971.039.965,00</b>				<b>20.573.385.000,00</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>32.971.039.965,00</b>				<b>20.573.385.000,00</b>
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 buah	2.723.947.578,00	Lain-lain PAD Yang Sah		120 buah	2.877.000.000,00
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30000 berita/tayang	24.954.483.144,00	Lain-lain PAD Yang Sah		30000 berita/tayang	11.676.000.000,00
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117 kali	289.627.318,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		117 kali	350.385.000,00
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 kali	2.451.333.968,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		77 kali	2.780.400.000,00

2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 kali	939.788.587,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		16 kali	894.600.000,00
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14000 photo/video	1.611.859.370,00	Lain-lain PAD Yang Sah		14000 photo/video	1.995.000.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>						<b>131.809.046.336,00</b>				<b>13.954.500.000,00</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>1.02</b>		<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>131.809.046.336,00</b>				<b>13.954.500.000,00</b>
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	Persentase peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	118.046.327.739,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		2 paket	1.102.500.000,00
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	Persentase peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 OPD/UPT	9.273.294.739,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		39 OPD/UPT	8.442.000.000,00

2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	Persentase peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 aplikasi	4.489.423.858,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		25 aplikasi	4.410.000.000,00
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>486.822.218,00</b>				<b>539.306.250,00</b>
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>						<b>486.822.218,00</b>				<b>539.306.250,00</b>
2	20	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>						<b>486.822.218,00</b>				<b>539.306.250,00</b>
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	Persentase data statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang valid	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	220.504.016,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		2 dokumen	243.731.250,00
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun	Persentase data statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang valid	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	140.047.996,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		1 dokumen	190.050.000,00
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	Persentase data statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang valid	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 sektor	126.270.206,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		11 sektor	105.525.000,00
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>372.223.036,00</b>				<b>485.360.358,00</b>
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>						<b>372.223.036,00</b>				<b>485.360.358,00</b>
2	21	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>242.812.678,00</b>				<b>355.950.000,00</b>

2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	147.271.778,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		2 dokumen	187.950.000,00
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah provinsi Bali	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 OPD	95.540.900,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		38 OPD	168.000.000,00
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>1.02</b>		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>					<b>129.410.358,00</b>				<b>129.410.358,00</b>	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali	Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 OPD	129.410.358,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		38 OPD	262.500.000,00

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Renja ini mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 ini sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



Denpasar, 1 September 2022.

Kepala Dinas,

**GEDE PRAMANA**

NIP. 19680531 199703 1 002